



**PRESIDEN AS JOE BIDEN TANDATANGANI PERINTAH EKSEKUTIF**

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif di Ruang Oval Gedung Putih setelah pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46, di Washington, Amerika Serikat, Rabu (20/1).

## Hari Pertama Kerja, Biden Cabut Sederet Kebijakan Era Trump

Biden cabut banyak kebijakan era Trump mulai soal imigrasi hingga penanganan pandemi.

**WASHINGTON(IM)** - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tanda tangani 15 perintah eksekutif yang mengubah kebijakan Donald Trump. Ia juga mengambil langkah pertama dalam isu pandemi virus korona dan perubahan iklim.

Disaksikan wartawan, Biden menandatangani sejumlah perintah eksekutif di Oval Office. Usai menandatangani perintah eksekutif, memorandum, dan perintah langsung, Biden mengatakan "tidak ada waktu yang terbuang".

"Sejumlah perintah eksekutif yang saya tanda tangani hari ini akan membantu mengubah arah krisis Covid-19. Kami akan mengatasi perubahan iklim dalam cara yang belum per-

nah dilakukan sebelumnya dan memperbaiki kesetaraan rasial dan membantu masyarakat yang terpinggirkan," kata Biden, Kamis (21/1).

"Ini semua hanya titik awal," tambahnya. Pembantu presiden mengatakan Biden menandatangani perintah yang mewajibkan masker di properti pemerintah federal. Ia juga memerintahkan pembentukan kantor koordinasi penanggulangan pandemi virus korona dan memulai kembali proses penanggulangan pandemi yang terhenti karena keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Biden juga menandatangani dokumen untuk memulai proses yang membawa Negeri Paman Sam bergabung kem-

balik ke Perjanjian Iklim Paris dan sejumlah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Termasuk mencabut kembali izin pipa minyak Keystone XL.

Presiden AS juga menandatangani sejumlah kebijakan mengenai imigrasi. Salah satunya menghentikan pembangunan tembok perbatasan dan mencabut larangan masuk bagi imigran dari negara mayoritas Muslim.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan langkah-langkah di hari pertama hanya awal dari serangkaian tindakan di masa mendatang.

"Dalam beberapa hari dan pekan ke depan, kami akan mengumumkan langkah eksekutif tambahan untuk mengatasi tantangan dan memenuhi janji presiden pada rakyat Amerika," kata Psaki.

Langkah-langkah lain yang akan diambil antara lain mencabut larangan transgender bergabung dengan militer serta menghentikan pendanaan un-

tuk program-program aborsi di luar negeri.

Di bidang ekonomi, Biden meminta Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memperpanjang moratorium pengurusan hingga akhir Maret. Pemerintah Biden juga meminta Departemen Pendidikan meninjau kembali tagihan utang mahasiswa hingga akhir September.

Sementara itu, dalam pidato pertamanya sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris menekankan aspirasi Amerika. Ia mengatakan, Presiden Joe Biden telah mengajak rakyat AS untuk memandang melampaui krisis dan bersatu.

"Momen ini banyak mewujudkan karakter kami sebagai sebuah bangsa, ini memperlihatkan siapa kami, bahkan di masa sulit, kami tidak hanya mimpi, kami mewujudkannya, kami tidak hanya melihat yang telah terjadi kami melihat apa yang bisa terjadi," kata Harris seperti dikutip CNN International, Kamis (21/1).

## Intelijen AS Janji Rilis Laporan Khashoggi

**WASHINGTON(IM)** - Direktur baru Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS), Avril Haines, berjanji akan merilis laporan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan kritikus Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Keputusan tersebut bisa mempermalukan Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dan merusak hubungan kedua negara.

Haines menjadi wanita pertama di Amerika yang menjabat Direktur Intelijen Nasional (DNI), posisi yang mengawasi badan-badan intelijen AS. Dia membuat janji itu pada sidang konfirmasi Senat pada hari Selasa lalu.

Kongres AS sejatinya pernah meminta DNI era Presiden Donald Trump untuk merilis laporan yang tidak diklasifikasikan kepada legislator tentang pembunuhan Khashoggi. Namun, pemerintahan Trump tidak menindaklanjutinya.

Khashoggi, seorang kritikus yang berubah menjadi orang dalam Saudi yang tinggal di AS, dibunuh dan dimutilasi oleh agen-agen Saudi di Konsulat Kerajaan di Istanbul pada 2018, yang menyebabkan protes global. Pejabat Saudi membantah Pangeran MBS memainkan peran apa pun, dengan mengatakan pembunuhan itu dilakukan oleh agen-agen nakal yang telah diadili.

Trump, saat menjabat presiden AS—mengutip kepentingan nasional seperti kesepakatan penjualan senjata—menyatakan dukungan untuk MBS, penguasa de facto Arab Saudi. Tapi kasus itu menjadi titik tekanan yang terus-menerus di Kongres, dan Biden mengatakan dia akan memperlakukan Arab Saudi sebagai "paria."

Kongres, dan Biden mengatakan dia akan memperlakukan Arab Saudi sebagai "paria." Laporan DNI, jika mengkritik sang pangeran, dapat semakin memperburuk hubungan AS dan Arab Saudi. MBS sendiri sedang menghadapi tantangan domestik termasuk ekonomi yang goyah dan ketidakpuasan dalam keluarga kerajaan.

"Menulis laporan itu akan menjadi upaya pemerintah Biden untuk membawa kembali masalah hak asasi manusia yang telah lama diabaikan oleh Trump ke dalam pilar kebijakan luar negeri AS," kata Ayham Kamel, kepala Timur Tengah dan Afrika Utara di konsultan Grup Eurasia.

"Saya tidak melihat ini sebagai upaya langsung untuk menyabotase hubungan AS-Saudi tetapi pasti akan menciptakan beberapa tantangan," ujarnya, seperti dikutip Bloomberg, Kamis (21/1).

Pangeran MBS juga menghadapi dua tuntutan hukum di AS yang berpotensi menimbulkan rasa malu, termasuk satu tuntutan terkait dengan dugaan perannya dalam pembunuhan Khashoggi.

Kemarahan yang dipicu oleh pembunuhan tersebut awalnya mengancam akan menggagalkan rencana transformasi ekonomi pangeran untuk melakukan diversifikasi dari minyak, membuat takut investor asing dan merusak reputasi kerajaan di luar negeri. Namun kehebohan itu berangsur-angsur memudar, dan banyak pengusaha yang membatalakan penampilan di Arab Saudi pada saat itu telah kembali.

"Sementara banyak akan tergantung pada rincian laporan, Pangeran Mohammed akan sensitif terhadap setiap pembungkaman kembali file Khashoggi, yang mengalihkan fokus dari rencana investasi dan modernisasi," kata Kamel. ● gul

## Avril Haines Perempuan Pertama Pimpin Intelijen Nasional AS

**WASHINGTON(IM)** - Senat Amerika Serikat (AS) telah mengkonfirmasi mantan pejabat CIA Avril Haines sebagai Direktur of National Intelligence (DNI) atau Direktur Intelijen Nasional AS, Rabu (20/1) waktu setempat.

Haines menjadi anggota kabinet pertama yang mendapatkan persetujuan Senat beberapa jam setelah Presiden Joe Biden dilantik.

Konfirmasi Haines di Senat juga menjadikannya sebagai perempuan pertama yang memimpin badan intelijen nasional AS. Dia mendapatkan suara setuju 84 berbanding 10 tidak setuju.

Seperti dilansir laman CNN, Haines akan mengambil alih komunitas intelijen yang berulang kali diremehkan dan dikesampingkan oleh Donald Trump selama empat tahun masa jabatannya. Direktur intelijen nasional adalah pejabat intelijen tertinggi presiden dan

memimpin sebuah badan yang mengkoordinasikan seluruh komunitas intelijen, sebanyak 17 badan dan organisasi.

Haines (51 tahun) adalah veteran dunia intelijen. Dia pernah menjabat sebagai wakil direktur CIA dan wakil penasihat keamanan nasional di pemerintahan Obama-Biden sebelumnya.

Setelah Trump dituduh mempolitisi dan mengasingkan komunitas intelijen, Haines berjanji untuk tetap bersikap apolitis. Dia juga mengatakan akan berusaha untuk membangun kembali kepercayaan dengan badan intelijen sekutu AS, setelah kecaucuan pemerintahan Trump.

"Untuk menjaga integritas komunitas intelijen kami, Director of National Intelligence (DNI) harus menegaskan bahwa, jika menyangkut intelijen, tidak ada tempat untuk politik—selamanya," kata Haines dalam sidang konfirmasi dilansir laman

Yahoo News, Kamis (21/1).

Ketua Komite Intelijen Senat Mark Warner memberikan dukungan kepada Haines. "Setelah dengan sengaja dirongrong selama empat tahun, komunitas intelijen berhak mendapatkan pemimpin yang kuat dan dikukuhkan oleh Senat untuk memimpin dan menghidupkannya kembali," katanya.

"Saya yakin Haines akan melayani dengan baik dan terohmat dalam peran tersebut dan saya berharap untuk bekerja dengannya," ujarnya menambahkan.

Biden dan Senat kini bergerak cepat untuk mendapatkan anggota di kabinet pemerintahannya. Selain Haines, Janet Yellen dari Departemen Keuangan adalah calon lain yang kemungkinan akan mendapatkan suara cepat di Senat. Meski masih perlu ada kesepakatan untuk mengadakan pemungutan suara pada nominasi. ● ans

## Ledakan Madrid, Tiga Orang Tewas

**MADRID(IM)** - Tiga orang tewas dan 11 warga lainnya luka-luka akibat ledakan di sebuah gedung di pusat Kota Madrid, Rabu siang (20/1). Empat korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Layanan Kedaruratan Madrid menyampaikan seluruh bukti yang dikumpulkan petugas di lokasi kejadian, yaitu gedung di Jalan Calle Toledo, menunjukkan ledakan mungkin terjadi karena kebocoran gas. Namun, penyebab pasti ledakan masih belum dapat diketahui.

"Ledakan itu sungguh mengejutkan, saya mendengarnya dan merasa ada ledakan tetapi saya tidak tahu di mana lokasinya," kata warga setempat, Isabel Romero, yang anaknya bersekolah di bangunan samping lokasi kejadian.

"Seluruh jendela di ruang kelas pecah dan anak-anak ketakutan," kata dia.

Petugas pemadam kebakaran masih berada di lokasi ledakan sampai sore hari. Layanan Kedaruratan Madrid mengumumkan bahwa kondisi pasti gedung belum dapat diketahui dan suhu kebocoran gas itu menyebabkan kebakaran yang masih terkendali.

"Teknisi listrik gedung, David Santos Muoz(35), terdenti-

fikasi sebagai salah satu korban tewas," kata Keuskupan Agung Madrid sebagaimana dikutip dari unggahannya di media sosial Twitter. Korban sempat membantu memperbaiki kerusakan di salah satu bangunan milik gereja satu hari sebelumnya.

Otoritas di Spanyol mengatakan, seorang perempuan berusia 85 tahun juga tewas akibat ledakan tersebut. Kementerian Luar Negeri Bulgaria turut menyampaikan bahwa korban ketiga adalah salah satu warganya yang berusia 47 tahun.

Seorang warga setempat mengatakan bangunan yang meledak itu menjadi tempat penginapan bagi para pendeta yang sedang berlatih dan penghuninya kerap memberi makanan gratis bagi para tuna wisma.

Lima lantai teratas di bangunan itu rusak dan tembok-tembok roboh, sementara dua lantai dari bawah masih utuh tetapi terbakar. Dari 11 korban yang terluca, empat di antaranya dirawat di rumah sakit. Satu korban menderita luka di bagian dada, sementara satu orang lainnya mengalami patah tulang. Usai ledakan, petugas penyelamat mengevakuasi orang-orang lanjut usia dari panti jompo yang berlokasi dekat bangunan. ● gul

## Seruan Arab Spring Kembali Muncul di Tengah Protes Tunisia

**TUNIS(IM)** - Bentrokan keras meletus untuk malam kelima pada Selasa (19/1) antara polisi dan pengunjuk rasa di beberapa kota Tunisia, termasuk ibu kota Tunis dan Sidi Bouzid, tempat lahirnya pemberontakan Musim Semi Arab (Arab Spring), ketika kemarahan dan frustrasi meningkat atas kesulitan ekonomi. Sebelumnya pada hari itu, pendemo berunjuk rasa di Tunis, menghidupkan kembali nyanyian yang bergema satu dekade lalu dalam revolusi yang mengartikan demokrasi: "Rakyat menginginkan rezim jatuh".

Di Sidi Bouzid, tempat revolusi 2011 dimulai, para saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa polisi menembakkan gas untuk membubarkan pengunjuk rasa yang mengangkat slogan-slogan menentang penguasa dan menuntut diakhirinya beberapa dekade marginalisasi (menjauhnya masyarakat dari elite).

Bentrokan juga terjadi di daerah miskin di Tunis, termasuk Ettadamen dan Sijoumi, saat ratusan pemuda yang marah membakar ban dan memblokir jalan. Protes siang hari dalam beberapa hari terakhir yang menuntut pekerjaan, martabat, dan pembatasan tahanan telah diikuti oleh kekerasan malam hari, dengan pembatasan Covid-19 yang memperparah kemundakan ekonomi yang lebih luas.

"Seluruh sistem harus berjalan... Kami akan kembali ke jalan dan kami akan mendapatkan kembali hak dan martabat kami yang direbut oleh elite korup setelah revolusi," kata Maher Abid, seorang pengunjuk rasa yang menganggur.

Sesaat sebelum peringatan 10 tahun revolusi pekan lalu, pemerintah Perdana Menteri

Hichem Mechichi memerintahkan penguncian empat hari dan jam malam yang lebih ketat terhadap pandemi virus corona, serta larangan protes.

Namun, di kota-kota di seluruh negara Afrika Utara, para pemuda telah melemparkan batu dan bom bensin, membakar ban dan menjarah toko-toko sementara polisi telah mengerahkan gas air mata dan pentungan, menangkis ratusan orang.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa, Mechichi mengatakan dia memahami kemarahan rakyat atas situasi ekonomi dan frustrasi kaum muda, tetapi kekerasan itu tidak dapat diterima. "Suaramu didengar dan amarahmu sah. Jangan biarkan nyabot di antara kamu," katanya, berbicara kepada pengunjuk rasa.

Penggelangan penguasa otokratis Tunisia yang sudah lama menjabat pada 2011 menginspirasi pemberontakan serupa di seluruh Afrika Utara dan Timur Tengah yang dijuluki "Musim Semi Arab". Pada Selasa, sekitar 250 orang berkumpul di Bourguiba Avenue di pusat kota Tunis, sementara demonstrasi lainnya berlangsung di kota-kota dekat Sidi Bouzid.

Para pedemo di ketiga aksi unjuk rasa memamerkan "rakyat menginginkan rezim jatuh", serta tuntutan akan pekerjaan. Tunisia menderita secara ekonomi bahkan sebelum krisis Covid-19, dengan pengangguran yang tinggi dan layanan negara yang menurun. Sebelumnya, senkat buruh yang kuat dan kelompok hak asasi lainnya menyuarakan dukungan untuk protes damai terhadap "kebijakan marginalisasi, pemiskinan dan kelaparan", menuduh negara menyalah-nyatakan harapan revolusi. ● ans

### PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Berdasarkan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT KARYAPRIMA ANUGERAH AGUNG (dalam likuidasi), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan") yang dinyatakan dalam Akta No. 12, yang dibuat di hadapan Kartika S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, seluruh pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut: (1) Membubarkan dan melikuidasi Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 20 Januari 2021, dan (2) Menunjuk Direksi Perseroan sebagai Likuidator Perseroan (selanjutnya disebut "Likuidator").

Bagi para pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan dapat menghubungi Likuidator secara tertulis, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengumuman ini disertai dengan dokumen asli dan lengkap ke alamat: Jalan Bandengan Selatan I C, Kelurahan Pekoja, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat

Up. : Direksi (selaku Likuidator)

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh Likuidator Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 22 Januari 2021  
Likuidator Perseroan  
Direksi



**PERTEMUAN VIRTUAL ASEAN DIGITAL DI KUALA LUMPUR**

Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bertiana Sari menyampaikan presentasi pada pertemuan 1st ASEAN Digital Senior Official Meeting yang berlangsung secara virtual di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (20/1). Kemkominfo mengangkat isu perlindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia.



**POLITISI THAILAND THANATHORN**

Politisi oposisi yang dilarang Thailand, Thanathorn Juangroongruangkit, berbicara dalam konferensi pers setelah Kementerian Digital melaporkan keluhan kriminal terhadapnya untuk memfitnah monarki setelah ia mengkritik strategi vaksin penyakit virus korona (COVID-19) negara tersebut di markas pusat partai di Bangkok, Thailand, Kamis (21/1).

## Malaysia Rugi Rp2 Triliun per Hari Akibat Karantina Wilayah

**KUALA LUMPUR(IM)** - Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz memperkirakan negaranya kehilangan RM 600 juta atau Rp 2 triliun per hari karena kebijakan Perintah Kontrol Gerakan (PKP) terbaru. Namun, kata dia, nilai itu lebih kecil dibandingkan dengan kebijakan PKP pada 2020 yang mengakibatkan kerugian RM2,4 miliar atau sekitar Rp8,3 triliun setiap hari pada Maret hingga Mei 2020.

PKP ini tidak seperti yang dilakukan pada Maret tahun lalu karena lima sektor penting masih terbuka. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UKM) seperti warung dan toko masih bisa beroperasi," ucap dia dalam jumpa pers terkait kebijakan bantuan ekonomi 2021 atau Permai di Kuala Lumpur pada Selasa malam.

Lima sektor penting yang ditetapkan dalam Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia (Permai) adalah manufaktur, konstruksi, jasa, perdagangan dan distribusi, serta perkebunan dan komoditas. Durasi PKP 2.0 tergantung kendali penularan case Covid-19," ujar dia.

Tengku Zafrul mengatakan Permai merupakan perbaikan atas inisiatif yang diumumkan pada APBN 2021. Dia mengatakan Permai juga dirancang khusus untuk bisnis yang tidak bisa berjalan seperti biasa. "Untuk saat ini kami mempertahankan proyeksi

pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kami. Ini juga yang menjadi salah satu alasan Permai diterapkan," ujar dia.

Dia mengatakan PDB Malaysia mencatat kontraksi sebesar 2,7 persen pada kuartal ketiga tahun 2020, yang termasuk yang terbaik di ASEAN dibandingkan dengan Singapura (-7 persen), Indonesia (-3,5 persen) dan Filipina (-11,5 persen).

Menurut dia, meski pemerintah telah mengalokasikan RM 15 miliar dengan tambahan suntikan fiskal RM 6,6 miliar melalui Permai, proyeksi defisit fiskalnya tidak berubah dari 5,4 persen.

"Masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah telah melakukan yang terbaik dan secara teratur melakukan musyawarah dengan kementerian, kesehatan mengenai aspek ekonomi untuk memastikan upaya tersebut seimbang," kata dia.

Pemerintah Malaysia pada Selasa (19/1) memutuskan memperluas Perintah Pengendalian Gerakan (PKP) atau karantina wilayah di Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Perlis selama 14 hari mulai Jumat ini. Menteri Keamanan Ismail Sabri Yaakob mengatakan keputusan itu dilakukan berdasarkan saran dan penilaian risiko Kementerian Kesehatan (Depkes) terkait tren peningkatan kasus positif Covid-19 di negara bagian tersebut. ● gul